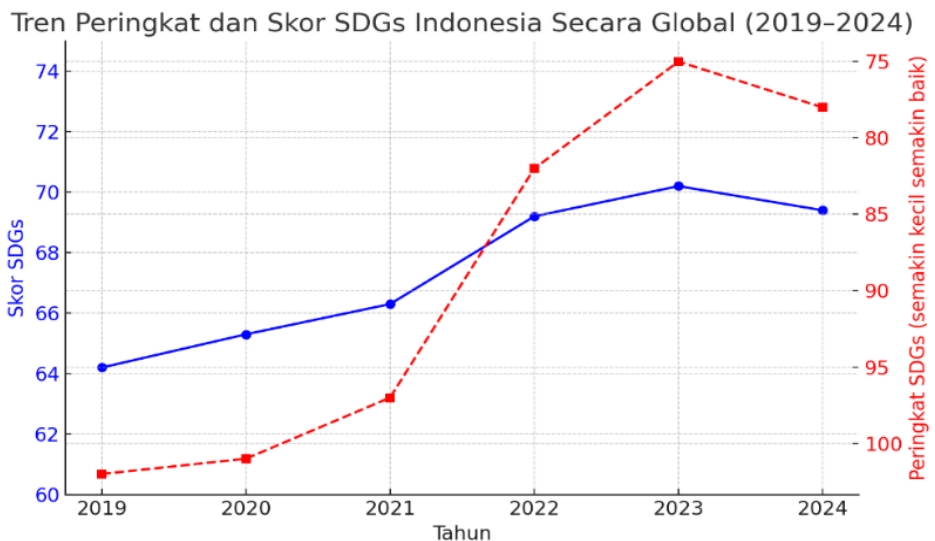


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Millennium Development Goals* (MDGs) dideklarasikan pada tahun 2000 sebagai delapan tujuan pembangunan global yang ditargetkan tercapai hingga tahun 2015. Berakhirnya MDGs menjadi titik awal bagi dunia dalam menyepakati agenda pembangunan global yang lebih luas dan berkelanjutan, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs disahkan oleh 193 negara, termasuk Indonesia, pada Sidang Umum PBB ke-70 di New York, Amerika Serikat. Agenda ini mencakup 17 tujuan dan 196 indikator yang dirancang untuk menjawab tantangan global seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, energi bersih, air bersih, perubahan iklim, dan perdamaian. Seluruh tujuan ini ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2030 sebagai upaya membangun dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan (*Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015*). Indonesia telah menjalankan komitmennya terhadap SDGs selama lima tahun terakhir. Komitmen ini dituangkan dalam (Peraturan Presiden Nomor 111, 2022).



Sumber: Diolah oleh penulis

**Gambar 1. 1 Data Peringkat dan Skor Capaian SDGs Indonesia Secara Global**

Berdasarkan **Gambar 1.1** yang bersumber dari *Sustainable Development Report* (SDR) tahun 2019–2024, dapat terlihat bahwa selama enam tahun terakhir Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam peringkat global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023, di mana Indonesia berhasil menempati posisi ke-75 dari 166 negara dengan skor 70,2. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dengan posisi Indonesia turun menjadi peringkat ke-78 dari 167 negara dan skor menurun menjadi 69,4. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan baru dalam mempertahankan konsistensi capaian pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Capaian Indonesia dalam indeks SDGs menunjukkan progres positif secara umum, namun hasil tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan yang berkelanjutan. Berbagai tantangan struktural seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan masih menjadi hambatan utama dalam mencapai seluruh target SDGs. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pembangunan berkelanjutan. Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs adalah sektor pertambangan, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional sekaligus dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Mae (2024), melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait sektor pertambangan mencatat pertumbuhan sebesar 6,12% (c-to-c) dengan kontribusi distribusi mencapai 10,52% pada tahun 2023, sehingga menjadikannya salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, selama delapan tahun terakhir (2016–2023), sektor pertambangan tumbuh rata-rata sebesar 13% dan menyumbang sekitar 8,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, operasi pertambangan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Menurut Jaringan Advokasi Tambang *Mining Advocacy Network* Simpul Maluku Utara (2024), salah satu wilayah yang terdampak adalah Maluku Utara, di mana hampir seluruh daratannya telah dibebani oleh 127 izin usaha pertambang. Hal ini menyebabkan tutupan hutan menurun secara signifikan, kerusakan ekosistem serta konflik sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

Berdasarkan data Global Forest Watch (2024), Halmahera Tengah kehilangan 27,9 ribu kilo hektare (kha) tutupan pohon, atau setara dengan 13% dari total luas daratan, sepanjang periode 2001 hingga 2023. Dari hilangnya

hutan ini diperkirakan menyebabkan pelepasan emisi karbon sebesar 22,4 juta ton CO<sub>2</sub>e. Secara khusus, pada area kekuasaan PT Weda Bay Nickel menyumbang kehilangan hutan sekitar 6.474 hektar sejak 2011 hingga 2024. Secara Keseluruhan, total lahan yang telah dibuka untuk pertambangan di Halmahera Tengah mencapai lebih dari 21 ribu hektare (Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network Simpul Maluku Utara, 2024).

Kerusakan hutan yang terjadi tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya di daerah tersebut. Buktinya bencana banjir bandang yang terus berulang terjadi di Halmahera Tengah, khususnya di kawasan Teluk Weda. Desa-desa yang terkena dampak tersebut berada di sekitar wilayah operasi pertambangan nikel berskala besar seperti PT Weda Bay Nickel dan kawasan industri PT Indonesia Weda Bay Park (IWIP). Kondisi serupa juga terjadi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Ketika tanggul milik Harita Nickel, diduga jebol dan menimbulkan banjir lumpur yang meredam pemukiman warga Desa Kawasi, sehingga memaksa penduduk mengungsi ke wilayah dataran tinggi (Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network Simpul Maluku Utara, 2024).

Aspek lingkungan dan kehidupan masyarakat adat, termasuk suku Tobelo Dalam atau O'Hongana Manyawa, semakin tertekan akibat perluasan aktivitas perusahaan nikel di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Suku ini sejak ratusan tahun yang lalu telah menjalani kehidupan yang tidak menetap atau berpindah-pindah di hutan belantara Pulau Halmahera, dengan hutan yang mereka anggap sebagai rumah sekaligus sumber utama kehidupan baik tempat tinggal, berburu, mencari makan, dan melanjutkan keturunan. Namun, keberadaan mereka kini makin terancam oleh aktivitas pertambangan nikel yang difasilitasi negara, sehingga menimbulkan tekanan serius terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat (Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network Simpul Maluku Utara, 2024).

Fenomena di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik operasional di sektor pertambangan dengan tujuan keberlanjutan yang diusung oleh SDGs. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan menjadi sangat penting untuk ditinjau lebih lanjut, terutama berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Novandito & Trisnawati (2024) menjelaskan tata kelola perusahaan mencerminkan bagaimana manajemen menjalankan seluruh operasional perusahaan, termasuk aspek pertanggungjawaban yang berkontribusi terhadap pencapaian pengungkapan SDGs. GCG sebagai sistem tata kelola perusahaan mengedepankan prinsip-prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan, prinsip tersebut tertuang dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) yang menjadi pengendali dan pengarah bagi perusahaan dalam mencapai keseimbangan kekuatan dan wewenang untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan (Parianti *et al.*, 2023).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memungkinkan perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang etis dan berorientasi jangka panjang, tidak semata-mata berfokus pada keuntungan ekonomi namun juga memastikan bahwa kebijakan dan strategi perusahaan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan, baik dalam operasional internal maupun hubungan eksternal perusahaan. Selain itu, tata kelola yang baik juga mendorong keterbukaan dalam pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan, sehingga publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengawasi secara transparan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Buniamin *et al.*, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menemukan hasil yang beragam antara lain, penelitian oleh Buniamin *et al.* (2022), Pradnyani *et al.* (2024), dan Surifah & Krismiaji (2025) menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap SDGs. Penelitian Novandito & Trisnawati (2024), dan Chien (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap SDGs.

Faktor lain yang turut menentukan kontribusi perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dinilai dapat menentukan kapasitas dan komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan. Perusahaan yang besar lebih cenderung menjadi fokus perhatian masyarakat dan pihak yang berkepentingan khusus secara sosial. Dengan memiliki sumber daya serta kapasitas yang lebih besar dalam menyajikan dan mengungkapkan informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar juga memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dalam melakukan pengungkapan informasi karena adanya tuntutan dan ekspektasi yang lebih besar dari para masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Pratama *et al.*, 2024). Oleh karena itu, ukuran perusahaan bukan hanya memberikan peluang untuk berkontribusi lebih besar terhadap SDGs, tetapi juga membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk meminimalkan dampak eksternalitas yang ditimbulkan.

Penelitian terdahulu yang telah mengkaji terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menemukan hasil yang beragam antara lain, penelitian oleh Pratama *et al.* (2024)

dan Rosati & Faria (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap SDGs. Penelitian Wahyuningrum *et al.* (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap SDGs.

Faktor lainnya juga yang turut menentukan kontribusi perusahaan terhadap pengungkapan SDGs adalah kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan menjadi faktor dalam menilai sejauh mana perusahaan mampu meminimalisasi dampak negatif terhadap ekosistem dan secara aktif berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Amalikhah & Haryono (2024) menjelaskan bahwa kinerja lingkungan bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pada lingkungan dan sosial dengan menjaga dan mengawasi proses berjalannya operasional perusahaan. Kinerja ini dapat dievaluasi melalui berbagai aspek seperti efisiensi penggunaan energi, pengendalian emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah berbahaya, konservasi keanekaragaman hayati, dan pelaksanaan reklamasi pascatambang. Komitmen perusahaan dalam menjaga kinerja lingkungan tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperlihatkan orientasi jangka panjang perusahaan dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) menemukan hasil yang beragam antara lain, penelitian oleh Rahmatika *et al.* (2025), Deomega & Sari (2025), Amalikhah & Haryono (2024) dan Farda & Saraswati (2024) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs. Penelitian Yuliasih & Susetyo (2020) menemukan hasil yang berbeda, dimana kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap SDGs.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat (*gap research*) berupa hasil temuan yang tidak konsisten terkait *Good Corporate Governance* (GCG), ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan SDGs. Dimana beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan, sementara penelitian lainnya tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan. Selain itu, penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan dalam lingkup sektor pertambangan di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi namun juga berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Di tengah ketidaksesuaian antara praktik bisnis dan tujuan keberlanjutan, serta hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, penelitian ini menjadi relevan untuk mendorong praktik bisnis yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap tingkat pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan periode terbaru tahun 2023–2024, sehingga mencerminkan kondisi terkini penerapan prinsip keberlanjutan di sektor pertambangan Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022 hingga 2024. Pemilihan populasi ini didasarkan pada peran strategis pertambangan dalam perekonomian nasional serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan fokus pada sektor pertambangan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan lengkap tentang bagaimana perusahaan bisa menjalankan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh GCG, Ukuran Perusahaan’ dan Kinerja Lingkungan Terhadap Tingkat Pengungkapan SDGS pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2022-2024”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan SDGS pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan SDGS pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
3. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan SDGS pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
4. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG), ukuran perusahaan, kinerja lingkungan secara bersamaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan SDGS pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap tingkat pengungkapan SDGs pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan SDGs pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024
3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap tingkat pengungkapan SDGs pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024
4. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), ukuran perusahaan, kinerja lingkungan secara bersamaan terhadap tingkat pengungkapan SDGs pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur dan wawasan akademik mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), ukuran perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda.
3. Bagi Perusahaan  
Bagi perusahaan, khususnya perusahaan pertambangan yang menjadi objek penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan komitmen perusahaan dalam mengungkapkan SDGs secara lebih transparan dan bertanggung jawab dalam laporan keberlanjutannya.
4. Bagi penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi penulis dalam memperluas wawasan dan pemahaman di bidang akuntansi, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan, serta sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

***(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)***